



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DONY AHMAD MUNIR
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 33901

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	945.294.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m ² /210 m ² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 4070 m ² /280 m ² di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m ² /200 m ² di KAB / KOTA SUMEDANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 229.650.000		
4. Tanah Seluas 872 m ² di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 23.544.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m ² /108 m ² di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m ² /200 m ² di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 36.050.000		
7. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m ² /200 m ² di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 36.050.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	260.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	147.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	979.037.475

**F. HARTA LAINNYA**

Sub Total

Rp. 2.331.331.475

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.331.331.475

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.